

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Kepegawaian :				
1. Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia: a. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup 2. Nota Dinas Tahun 2023	Pasal 17 G, H, I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Surat-surat badan public atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan	√	<ul style="list-style-type: none"> - 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang - Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/ BUMD/ Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Pemeriksaan dan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Kendal	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, - yaitu informasi yang dapat: <ul style="list-style-type: none"> a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 	√	5 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

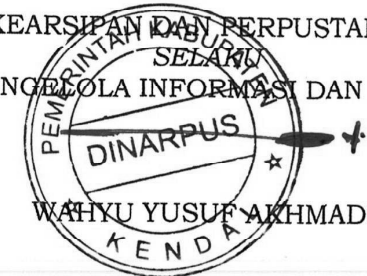
Hasil Assessment Kepegawaian, Berita Acara Baperjakat, Proses Konsultasi Pengangkatan dalam jabatan Eselon II	Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	√	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public
User Password pada database Sistem Informasi Kepegawaian	Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	√	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public
Pengadaan Barang dan Jasa				
Rincian Harga Perkiraan Sendiri Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan - Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar 	√	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuka apabila diminta oleh APH untuk penyidikan kasus hukum dan atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Laporan Keuangan yang belum diaudit,	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP	- Dapat membuka rahasia perusahaan		- Setelah Penerbitan Laporan Audit

Keanggotaan	-	-		-
User Password pada database Sistem Informasi data Aplikasi Perpustakaan dan Kearsipan.	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi	√	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Data Anggota perpustakaan dan pengguna layanan kearsipan,	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> - dapat mengungkap rahasia pribadi - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan 	√	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Data Pribadi Anggota Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> - dapat Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - mengungkap rahasia pribadi - instansi pelaksana melaksanakan administrasi kependudukan menjamin kerahasiaan dan keamanan data. - Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya meliputi Nomor KK, NIK, Tanggal/bulan/ tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, NIK ibu dan ayah kandung. 	√	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

Persandian	-	-		
Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi), Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik, Setting Konfigurasi Network, Segment Network, Security Network, Manajemen Bandwith, Lokasi server, Internet Protocol/IP Address Private, Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) - Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses 	√	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 Juni 2023

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. KENDAL
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



WAHYU YUSUF AKHMADI

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 481.1.6/1347/DINARPUS
TAHUN 2023

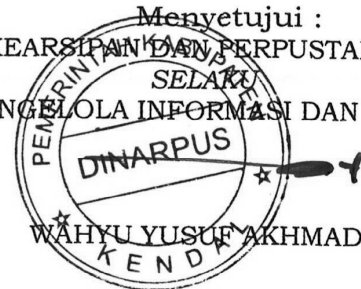
Pada hari ini Selasa tanggal 20 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kendal telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	NURUL FITRIA RIDHOSARI, SE	Plt. Kasubag Umpeg	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	
2.				
2.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dbuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui :
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. KENDAL
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



WAHYU YUSUF AKHMADI